



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF X NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Temuan BBM Rp 1,3 Miliar Polisi Surati Pemkab RL

CURUP - Polres Rejang Lebong memastikan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu terkait pertanggungjawaban belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Rp 1,3 miliar di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten RL tahun anggaran 2021. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Kabupaten Rejang Lebong, diketahui bahwa belanja BBM tersebut

tidak diyakini kewajarannya. Kapolres AKBP Tonny Kurniawan, S.IK melalui Kasat Reskrim AKP Sampson Sosa Hutapea, S.IK mengakui menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengumpulkan data (Puldata). Bahkan dalam waktu dekat mereka akan bersurat kepada Pemkab RL terkait adanya temuan BPK tersebut untuk memastikan data dan tindak lanjut yang sudah dilakukan.

Apalagi, sambung Sampson, hal ini merupakan temuan dari audit BPK RI. "Kita bersurat ke Pemkab Rejang Lebong terkait data pasti hasil temuan BPK RI tersebut, karena hasil audit diserahkan ke Pemkab Rejang Lebong. Ini untuk kepentingan pengumpulan data," sampai Sampson.

Setelah nanti data terkumpul, baru dilakukan tindak lanjut pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dalam rangka klarifikasi. "Kita belum bisa banyak memberikan keterangan, kita lakukan dulu langkah awal baru nanti bisa sampaikan hasilnya," imbuh Sampson.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) RL Yusran Fauzi, ST menyampaikan, sesuai rekomendasi BPK tersebut, Pemkab RL sudah menindaklanjutinya. Mulai dari melakukan pemeriksaan pejabat

di DLH Kabupaten RL dan sudah memberikan saksi kepada dua pejabat terkait temuan BPK di DLH Kabupaten RL.

"Kita sudah menindaklanjutinya, kemudian mengambil langkah setelah adanya hasil pemeriksaan dari Inspektorat. Yaitu diantaranya memberikan sanksi kepada pejabat terkait dan meminta untuk melakukan pengembalian dari temuan hasil pemeriksaan pihak Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong," singkat Yusran.

Terpisah, Sekretaris Umum Himnunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Curup Ibrahim Rasyid meminta aparat penegak hukum (APH) serius menangani temuan BPK RI tersebut. Terlebih jika memang tidak ada penyelesaian dari pejabat yang terkait. Tidak hanya di DLH kabupaten RL, APH diminta juga untuk memastikan temuan-temuan hasil audit BPK di OPD lainnya yang memang belum ada tindak lanjut.

"Kita berharap jika tidak ada penyelesaian dari temuan BPK ini hingga batas waktu yang ditentukan, APH tidak hanya sebatas melakukan Pulbaket dan Puldata saja. Tapi jika memang ada tindak pidana yang terjadi, harus ditindak tegas dan ditindaklanjuti ke proses penyidikan," demikian Ibrahim.

Sebelumnya BPK melakukan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban belanja BBM pada DLH RL. Menunjukkan terdapat 29 kendaraan operasional persampahan. Meliputi 10 unit dump truk, 3 unit mobil armroll truk dan 4 unit kendaraan roda empat. Serta 9 unit motor gerobak roda tiga dan tiga kendaraan operasional sampah khusus.

Sopir kendaraan operasional tersebut melakukan pengisian BBM di SPBU setiap hari Senin dan Kamis. Membawa kupon BBM diperoleh dari Bidang Pengelolaan Sampah DLH. Adapun

kupon digunakan terdiri dari jenis kupon BBM, yakni kupon BBM jenis dextrite dengan nilai kupon masing-masing 10,12 dan 15 liter. Serta kupon BBM jenis pertalite dengan nilai tiga liter.

Kupon tersebut diserahkan pada petugas SPBU pada saat pengisian BBM. Selanjutnya pihak SPBU akan melakukan penagihan pembayaran atas pengisian BBM setiap akhir bulan. Dengan menyampaikan dokumen pertanggungjawaban dengan melampirkan semua kupon BBM yang telah dikumpulkan oleh petugas SPBU dari para sopir yang melakukan pengisian BBM.

Dokumen pertanggungjawaban disampaikan hanya berupa surat tagihan total atas BBM dari SPBU. Dengan melampirkan bukti kupon BBM yang dicetak DLH.

"Hasil penelusuran lebih lanjut atas tagihan tersebut menunjukkan tidak terdapat rekapitulasi penggunaan kupon BBM yang ditagih secara rinci dan tidak terdapat bukti struk atau nota pengisian BBM dari SPBU," bunyi audit BPK tersebut.

Selain itu, kupon BBM yang dilampirkan sebagai bukti belanja BBM juga tidak dapat diyakini kebenarannya karena hanya ditandatangani oleh sopir. Tidak terdapat tanda tangan dari petugas SPBU. Serta terdapat kupon yang tidak ditandatangani dan distempel oleh petugas SPBU. Pada kupon-kupon tersebut juga terdapat dua jenis stempel berbeda. Padahal berdasarkan keterangan dari pihak penyedia, hanya terdapat satu jenis stempel.

Hasil pemeriksaan BPK sendiri diketahui ada total jumlah SPJ yang tidak sesuai senyatanya dari dokumen pertanggungjawaban tersebut sebesar Rp 80.308.800. Kemudian berdasarkan kondisi atas dokumen pertanggungjawaban belanja BBM sebesar Rp 1.306.228.400 (Rp 1.386.537.200-

Rp 80.308.800) tidak dapat diyakini kewajarannya.

Dari temuan BPK itu juga diketahui bahwa permasalahan tersebut disebabkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada DLH kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan belanja BBM di lingkungan satuan kerjanya. Lalu Kepala Bidang (Kabid) Persampahan diduga tidak mempertanggungjawabkan belanja BBM sesuai dengan senyatanya. Diduga Bendahara Pengeluaran juga kurang cermat dalam melakukan pembayaran Belanja BBM.

Atas hal tersebut, Belanja BBM tidak sesuai senyatanya sebesar Rp 80.308.800 disetorkan ke kas daerah. Dalam perjalanannya diketahui, telah dilakukan penyetoran atas kelebihan pembayaran Belanja BBM ke Kas Daerah Pemkab RL oleh DLH Kabupaten RL masing-masing Rp 60 juta pada 8 April 2022 dan Rp 20.308.800 pada 13 April 2022.

Selain itu, BPK RI memberikan rekomendasi kepada Bupati RL untuk mengambil langkah atau memberikan intruksi kepada Kepala DLH selaku PA agar lebih cermat dalam mengawasi dan mengendalian pelaksanaan Belanja BBM. Lalu memerintahkan Kabid Persampahan untuk melaksanakan kegiatan Belanja BBM sesuai dengan ketentuan, memerintahkan PPK untuk melakukan verifikasi Belanja BBM sesuai ketentuan, melakukan evaluasi perjanjian dengan pihak SPBU untuk menggunakan nota print out sebagai bukti pertanggungjawaban dan menyetorkan Belanja BBM yang tidak sesuai senyatanya sebesar Rp 80.308.800,00 ke kas daerah.